

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Loka Penelitian Sapi Potong
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Penelitian Sapi Potong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Loka Penelitian Sapi Potong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Penelitian Sapi Potong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasuruan, 31 Desember 2019
Kepala Loka Penelitian Sapi Potong,

Dr. Ir. Dicky Pamungkas, M.Sc.
NIP. 19650605 199203 1 002

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Penerapan Penyusutan;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.6/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.

Kata Pengantar	i
Dasar Hukum	ii
Daftar Isi	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	14
B.2. Belanja	15
B.3. Belanja Pegawai	16
B.4. Belanja Barang	17
B.5. Belanja Modal	18
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
C.1. Aset Lancar	20
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	20
C.1.3. Persediaan	20
C.2. Aset Tetap	21
C.2.1. Tanah	21
C.2.2. Peralatan dan Mesin	21
C.2.3. Gedung dan Bangunan	22
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	23
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	23
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
C.3. Aset Lainnya	24
C.3.1. Aset Tak Berwujud	24
C.3.2. Aset Lain-lain	24
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	25
C.5. Ekuitas	25
C.5.1. Ekuitas	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	26
D.2. Beban Pegawai	26
D.3. Beban Persediaan	27

D.4.	Beban Barang dan Jasa	28
D.5.	Beban Pemeliharaan	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	30
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	30
D.8.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
E.1.	Ekuitas Awal	32
E.2.	Surplus/Defisit-LO	32
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	32
E.3.1.	Koreksi Nilai Persediaan	32
E.3.2.	Koreksi Atas Reklasifikasi	32
E.3.3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	33
E.3.4.	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	33
E.4.	Transaksi Antar Entitas	34
E.4.1.	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	34
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar	34
E.4.3.	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	35
E.5.	Ekuitas Akhir	35
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	36
F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	36

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Loka Penelitian Sapi Potong yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 31 Desember 2019
Kepala Loka Penelitian Sapi Potong,

Dr. Ir. Dicky Pamungkas, M.Sc.
NIP. 19650605 199203 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka Penelitian Sapi Potong Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp635.937.512,00 atau mencapai 132,74% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp479.095.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp21.651.378.744,00 atau mencapai 97,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp22.167.795.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp162.516.729.605,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp189.912.290,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp162.325.626.601,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.190.714,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp162.516.729.605,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp530.272.732,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp19.789.106.029,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-19.258.833.297,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-532.648.695,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-19.791.481.992,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp153.931.312.830,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-19.791.481.992,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp6.797.703.688,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp21.579.195.079,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp162.516.729.605,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LOKA PENELITIAN SAPI POTONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	479.095.000,00	635.937.512,00	132,74	545.361.032,00
Jumlah Pendapatan		479.095.000,00	635.937.512,00	132,74	545.361.032,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.105.050.000,00	5.090.791.317,00	99,72	4.773.014.640,00
Belanja Barang	B.4.	12.230.653.000,00	11.976.455.227,00	97,92	11.457.293.227,00
Belanja Modal	B.5.	4.832.092.000,00	4.584.132.200,00	94,87	8.037.626.943,00
Jumlah Belanja		22.167.795.000,00	21.651.378.744,00	97,67	24.267.934.810,00

II. NERACA

LOKA PENELITIAN SAPI POTONG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.	0,00	1.400.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	161.146.490,00	0,00
Persediaan	C.1.3.	28.765.800,00	374.316.900,00
Jumlah Aset Lancar		189.912.290,00	375.716.900,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	126.137.494.000,00	123.606.566.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	17.360.881.378,00	13.347.788.978,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	29.527.232.183,00	24.404.810.383,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.567.482.680,00	1.488.460.680,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	224.600.000,00	29.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	32.600.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-12.492.063.640,00	-9.357.756.306,00
Jumlah Aset Tetap		162.325.626.601,00	153.552.069.735,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	3.000.000,00	3.000.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	0,00	6.915.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-1.809.286,00	-6.388.805,00
Jumlah Aset Lainnya		1.190.714,00	3.526.195,00
Jumlah Aset		162.516.729.605,00	153.931.312.830,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	162.516.729.605,00	153.931.312.830,00
Jumlah Ekuitas		162.516.729.605,00	153.931.312.830,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		162.516.729.605,00	153.931.312.830,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**LOKA PENELITIAN SAPI POTONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	530.272.732,00	525.144.033,00
JUMLAH PENDAPATAN		530.272.732,00	525.144.033,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.090.791.317,00	4.773.014.640,00
Beban Persediaan	D.3.	7.207.389.618,00	7.675.880.471,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.446.156.724,00	2.005.467.016,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	459.004.593,00	440.479.856,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.823.200.112,00	1.361.484.705,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	2.762.563.665,00	2.000.422.441,00
JUMLAH BEBAN		19.789.106.029,00	18.256.749.129,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-19.258.833.297,00	-17.731.605.096,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	3.500.000,00	21.616.999,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	86.361.195,00	158.080.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	191.302.380,00	378.770.625,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	641.089.880,00	267.339.254,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-532.648.695,00	-25.031.630,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-19.791.481.992,00	-17.756.636.726,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LOKA PENELITIAN SAPI POTONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	153.931.312.830,00	147.767.950.202,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-19.791.481.992,00	-17.756.636.726,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	6.797.703.688,00	196.463.433,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	242.741.000,00	159.269.000,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2.	-16.086.118,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3.	6.892.661.000,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.4.	-321.612.194,00	37.194.433,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	21.579.195.079,00	23.723.535.921,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	162.516.729.605,00	153.931.312.830,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Penelitian Sapi Potong

Loka Penelitian Sapi Potong didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk menjadi Lembaga Penelitian Sapi Potong Nasional bertaraf Internasional melalui pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya plasma nutfah Sapi Potong. Untuk mewujudkan tujuan Kantor Loka Penelitian Sapi Potong berkomitmen dengan visi “Menjadi Lembaga Penelitian Sapi Potong Terkemuka dalam Mewujudkan Sistem Pertanian Bio-Industri Tropika Berkelanjutan”.

Adapun misi Loka Penelitian Sapi Potong sebagai berikut:

1. Menghasilkan inovasi teknologi sapi potong tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri.
2. Mengembangkan inovasi sapi potong tropika unggul dalam rangka peningkatan penguasaan sains dan teknologi (*Scientific Recognition*) dan pemanfaatannya dalam pembangunan pertanian bioindustri (*Impact Recognition*).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Penelitian Sapi Potong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Loka Penelitian Sapi Potong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Penelitian Sapi Potong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Loka Penelitian Sapi Potong yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka Penelitian Sapi Potong adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Loka Penelitian Sapi Potong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.925.000,00	1.925.000,00
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	35.720.000,00	35.720.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	441.450.000,00	441.450.000,00
Jumlah Pendapatan	479.095.000,00	479.095.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.058.190.000,00	5.070.190.000,00
Belanja Lembur	34.860.000,00	34.860.000,00
Belanja Barang Operasional	1.133.250.000,00	1.124.334.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.474.395.000,00	1.257.613.000,00
Belanja Barang Persediaan	7.188.796.000,00	7.462.772.000,00
Belanja Jasa	330.600.000,00	311.352.000,00
Belanja Pemeliharaan	268.050.000,00	246.184.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.678.059.000,00	1.828.398.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.025.000.000,00	3.898.092.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	815.000.000,00	934.000.000,00
Jumlah Belanja	21.006.200.000,00	22.167.795.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp635.937.512,00 atau mencapai 132,74% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp479.095.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	35.720.000,00	41.880.000,00	117,25
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	41.024.780,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.925.000,00	8.619.732,00	447,78
Pendapatan Denda	0,00	12.798.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	59.740.000,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	441.450.000,00	471.875.000,00	106,89
Jumlah	479.095.000,00	635.937.512,00	132,74

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,61% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Loka Penelitian Sapi Potong adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	41.880.000,00	36.105.000,00	16,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	41.024.780,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.619.732,00	27.569.532,00	- 68,73
Pendapatan Denda	12.798.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	59.740.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	471.875.000,00	481.686.500,00	-2,04
Jumlah	635.937.512,00	545.361.032,00	16,61

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp21.651.378.744,00 atau 97,67% dari anggaran belanja sebesar Rp22.167.795.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.105.050.000,00	5.090.796.916,00	99,72
Belanja Barang	12.230.653.000,00	11.976.455.227,00	97,92
Belanja Modal	4.832.092.000,00	4.584.132.200,00	94,87
Total Belanja Kotor	22.167.795.000,00	21.651.384.343,00	97,67
Pengembalian Belanja		-5.599,00	0.00
Total Belanja	22.167.795.000,00	21.651.378.744,00	97,67

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -10,78% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Namun Secara prosentase serapan anggaran mengalami kenaikan, pada tahun 2018 serapan anggaran 94,46% dari sedang tahun 2019 adalah 97,67%. Jadi, penurunan serapan dikarenakan penurunan pagu anggaran, pada tahun 2018 sebesar Rp25.691.119.000,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.22.167.795.000,- sehingga mengalami penurunan serapan sebesar Rp3.523.324.000,-.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	5.090.791.317,00	4.773.014.640,00	6,66
Belanja Barang	11.976.455.227,00	11.457.293.227,00	4,53
Belanja Modal	4.584.132.200,00	8.037.626.943,00	-42,97
Total Belanja	21.651.378.744,00	24.267.934.810,00	-10,78

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.090.791.317,00 dan Rp4.773.014.640,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,66% dari TA 2018. Hal ini disebabkan adanya penambahan 9 orang CPNS pada

tahun 2019, yang terdiri dari 5 orang CPNS calon Teknisi Litkayasa dan 3 Orang CPNS calon Peneliti serta 1 orang CPNS calon Dokter Hewan.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.055.959.916,00	4.738.212.056,00	6,71
Belanja Lembur	34.837.000,00	34.805.000,00	0,09
Jumlah Belanja Kotor	5.090.796.916,00	4.773.017.056,00	6,66
Pengembalian Belanja Pegawai	-5.599,00	-2.416,00	131,75
Jumlah Belanja	5.090.791.317,00	4.773.014.640,00	6,66

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.976.455.227,00 dan Rp11.457.293.227,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,53% dari TA 2018. Hal ini disebabkan karena belanja barang sebagian besar adalah pakan ternak dan pada tahun 2019 pengadaannya dilaksanakan dengan metode lelang cepat/tender cepat, sehingga banyak membantu serapan/pelaksanaan pengadaan.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.123.165.830,00	1.148.287.957,00	-2,19
Belanja Barang Non Operasional	1.014.613.896,00	631.669.691,00	60,62
Belanja Barang Persediaan	7.461.005.698,00	7.837.322.985,00	-4,80
Belanja Jasa	308.376.998,00	225.509.368,00	36,75
Belanja Pemeliharaan	246.092.693,00	253.018.521,00	-2,74
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.823.200.112,00	1.361.484.705,00	33,91
Jumlah Belanja Kotor	11.976.455.227,00	11.457.293.227,00	4,53
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	11.976.455.227,00	11.457.293.227,00	4,53

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.584.132.200,00 dan Rp8.037.626.943,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -42,97% dibandingkan TA 2018. Hal ini dikarenakan pagu anggaran belanja modal tahun 2018 lebih tinggi daripada tahun 2019.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.763.021.400,00	2.905.510.600,00	29,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	821.110.800,00	5.132.116.343,00	-84,00
Jumlah Belanja Kotor	4.584.132.200,00	8.037.626.943,00	-42,97
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.584.132.200,00	8.037.626.943,00	-42,97

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.763.021.400,00 dan Rp2.905.510.600,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 29,51% dibandingkan TA 2018. Hal ini dikarenakan pagu anggaran tahun 2019 lebih besar diperuntukan untuk pengadaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan penelitian.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.763.021.400,00	2.905.510.600,00	29,51
Jumlah Belanja Kotor	3.763.021.400,00	2.905.510.600,00	29,51
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.763.021.400,00	2.905.510.600,00	29,51

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp821.110.800,00 dan

Rp5.132.116.343,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -84,00% dibandingkan TA 2018. Hal ini dikarenakan di tahun 2019 pembangunan gedung dan bangunan hanya ada penambahan kelanjutan dari pembanguan gedung sebelumnya, yang dananya berasal dari SMARD dan renovasi biosekuriti yang dananya berasal dari hasil revisi PNBP.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	821.110.800,00	5.132.116.343,00	-84,00
Jumlah Belanja Kotor	821.110.800,00	5.132.116.343,00	-84,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	821.110.800,00	5.132.116.343,00	-84,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.400.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp161.146.490,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Tahun 2019 terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas karena ada Saldo hibah langsung dari kegiatan ACIAR yang masih belum digunakan/disahkan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
Saldo Kas Tunai	27.265.648,00
Saldo Bank	133.880.842,00
Jumlah	161.146.490,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.765.800,00 dan Rp374.316.900,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	2.537.300,00	2.702.700,00
Bahan untuk Pemeliharaan	228.500,00	126.200,00
Persediaan Lainnya	26.000.000,00	371.488.000,00
Jumlah	28.765.800,00	374.316.900,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp126.137.494.000,00 dan Rp123.606.566.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	123.606.566.000,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Kesalahan input IP	2.530.928.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	126.137.494.000,00

Mutasi transaksi penambahan tanah terjadi karena adanya koreksi Revaluasi sebesar Rp2.530.928.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.360.881.378,00 dan Rp13.347.788.978,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	13.347.788.978,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	1.248.810.400,00
Pembelian	1.243.671.000,00
Transfer Masuk	445.071.000,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	2.503.528.000,00
Pengembangan Nilai Aset	15.822.400,00
Mutasi Kurang	

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-1.248.810.400,00
Reklasifikasi Keluar	-195.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	17.360.881.378,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-9.463.893.371,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	7.896.988.007,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa mutasi penambahan adanya pengadaan peralatan Laboratorium Reproduksi.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.527.232.183,00 dan Rp24.404.810.383,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	24.404.810.383,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	839.710.800,00
Koreksi Kesalahan input IP	4.282.711.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	-820.392.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	29.527.232.183,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-2.483.594.708,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	27.043.637.475,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan berupa mutasi penambahan tahun berjalan adalah adanya renovasi gedung Laboratorium Reproduksi lanjutan, renovasi Bio sekuriti serta Pembangunan gudang Potong Kuku serta adanya koreksi Revaluasi.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.567.482.680,00 dan Rp1.488.460.680,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.488.460.680,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Kesalahan input IP	79.022.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	1.567.482.680,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-56.755.813,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.510.726.867,00

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya koreksi Revaluasi sebesar Rp79.022.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp224.600.000,00 dan Rp29.600.000,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	29.600.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	195.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	224.600.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	224.600.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya yaitu pengadaan maket Kantor Loka Penelitian Sapi Potong berupa maket konvensional, dan maket digital serta neon bok/patung sapi

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp32.600.000,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-12.492.063.640,00 dan Rp-9.357.756.306,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	17.360.881.378,00	-9.463.893.371,00	7.896.988.007,00
2.	Gedung dan Bangunan	29.527.232.183,00	-2.483.594.708,00	27.043.637.475,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.567.482.680,00	-56.755.813,00	1.510.726.867,00
4.	Aset Tetap Lainnya	224.600.000,00	0,00	224.600.000,00
Akumulasi Penyusutan		48.680.196.241,00	-12.492.063.640,00	36.188.132.601,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp3.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Hak Cipta	1.000.000,00
Software	2.000.000,00
Jumlah	3.000.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.915.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Loka Penelitian Sapi Potong serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.915.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-6.915.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain berupa penghapusan bangunan untuk kandang percobaan.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Loka Penelitian Sapi Potong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-1.809.286,00 dan Rp-6.388.805,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	3.000.000,00	-1.750.000,00	1.250.000,00
Akumulasi Penyusutan		3.000.000,00	-1.809.286,00	1.190.714,00

C.5. EKUITAS

C.5.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp162.516.729.605,00 dan Rp153.931.312.830,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp530.272.732,00 dan Rp525.144.033,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	12.798.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	470.475.000,00	481.686.500,00	-2,33
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	700.000,00	1.035.000,00	-32,37
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	41.880.000,00	36.105.000,00	16,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	2.900.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.419.732,00	3.417.533,00	29,33
Jumlah	530.272.732,00	525.144.033,00	0,98

PNBP senilai Rp12.798.000,00 dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sedangkan Rp470.475.000,00 hasil dari penjualan ternak afkir, sedangkan sewa *Guest House* senilai Rp.700.000,00 dan hasil pendapatan dari hasil analisa laboratorium mencapai Rp.41.800.000,00, sedangkan dari sewa rumah dinas mencapai Rp.4.419.732,00.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.090.791.317,00 dan Rp4.773.014.640,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.433.697.940,00	3.149.021.140,00	9,04
Beban Pembulatan Gaji PNS	52.431,00	48.212,00	8,75
Beban Tunj. Anak PNS	75.455.603,00	76.140.625,00	-0,90
Beban Tunj. Beras PNS	190.247.340,00	191.116.380,00	-0,45
Beban Tunj. Fungsional PNS	406.800.000,00	412.950.000,00	-1,49
Beban Tunj. PPh PNS	22.110.757,00	18.192.865,00	21,54
Beban Tunj. Struktural PNS	4.320.000,00	5.040.000,00	-14,29
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	272.631.246,00	267.256.118,00	2,01
Beban Tunjangan Umum PNS	132.905.000,00	120.910.000,00	9,92
Beban Uang Lembur	34.837.000,00	34.805.000,00	0,09
Beban Uang Makan PNS	517.734.000,00	497.534.300,00	4,06
Jumlah	5.090.791.317,00	4.773.014.640,00	6,66

Beban pegawai tahun berjalan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adan penambahan 9 orang CPNS terdiri dari calon tenaga teknisi sebanyak 5 orang ,1 orang calon dokter hewan dan 3 orang calon peneliti, disamping itu terjadi kenaikan beban belanja pegawai dikarenakan naiknya tunjangan fungsional tenaga peneliti.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.207.389.618,00 dan Rp7.675.880.471,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	827.333.028,00	520.119.607,00	59,07
Beban Persediaan konsumsi	6.314.058.600,00	7.053.116.608,00	-10,48
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	450.000,00	0,00	0,00
Beban persediaan lainnya	65.547.990,00	102.644.256,00	-36,14
Jumlah	7.207.389.618,00	7.675.880.471,00	-6,10

Beban persediaan bahan baku merupakan bahan pakan ternak yang belum jadi seperti katul, bungkil kopra, kulit kedelai dan lain-lain, yang akan digunakan sebagai persediaan bahan pakan ternak sambil menunggu proses anggaran tahun berikutnya. Beban persediaan bahan konsumsi sebagian besar merupakan pakan ternak pabrikan/pakan jadi yang akan digunakan pada awal tahun anggaran. Beban persediaan pita cukai, materai dan leges sebagian besar berupa materai yang digunakan sebagai penunjang dokumen yang terkait dengan tupoksi Loka. Beban persediaan lainnya adalah berupa ternak yang masuk pada akun persediaan .

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.446.156.724,00 dan Rp2.005.467.016,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	162.702.380,00	88.608.000,00	83,62
Beban Barang Non Operasional Lainnya	563.411.516,00	386.611.691,00	45,73
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	145.390.000,00	200.240.000,00	-27,39
Beban Honor Output Kegiatan	288.500.000,00	156.450.000,00	84,40
Beban Jasa Konsultan	54.919.700,00	30.250.000,00	81,55
Beban Jasa Lainnya	3.368.200,00	0,00	0,00
Beban Keperluan Perkantoran	977.775.830,00	948.047.957,00	3,14
Beban Langganan Air	2.375.010,00	1.337.880,00	77,52

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Langganan Listrik	241.189.887,00	185.148.811,00	30,27
Beban Langganan Telepon	6.524.201,00	8.772.677,00	-25,63
Jumlah	2.446.156.724,00	2.005.467.016,00	21,97

Beban barang dan jasa adalah beban yang dikelola untuk kelancaran penyelenggaraan sehari-hari perkantoran, diantaranya langganan jasa dan penyelenggaraan ISO, sehingga Belanja non operasional lainnya lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp459.004.593,00 dan Rp440.479.856,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.720.000,00	47.999.700,00	9,83
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.999.930,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.677.963,00	100.516.701,00	-4,81
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	71.444.950,00	70.060.110,00	1,98
Beban Persediaan Suku Cadang	224.161.750,00	221.903.345,00	1,02
Jumlah	459.004.593,00	440.479.856,00	4,21

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun ini digunakan untuk perbaikan tempat parkir, perbaikan tempat cucian mobil dan perbaikan atap penghubung gedung kantor dengan gedung laboratorium, sedangkan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya digunakan untuk memperbaiki kandang ternak. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin serta beban persediaan bahan untuk pemeliharaan digunakan untuk memperbaiki kendaraan operasional, sedangkan beban persediaan suku cadang sebagian besar digunakan untuk suku cadang alat laboratorium.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.823.200.112,00 dan Rp1.361.484.705,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.819.000.112,00	1.355.934.705,00	34,15
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.200.000,00	5.550.000,00	-24,32
Jumlah	1.823.200.112,00	1.361.484.705,00	33,91

Bertambahnya beban perjalanan dinas di tahun ini dikarenakan bertambahnya kegiatan penelitian yang dilakukan di luar wilayah Jawa Timur, yang merupakan kegiatan pokok sesuai tupoksi Loka Penelitian Sapi Potong.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.762.563.665,00 dan Rp2.000.422.441,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Hak Cipta	14.286,00	7.143,00	100,00
Beban Amortisasi Software	500.000,00	500.000,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.024.571.411,00	770.547.940,00	32,97
Beban Penyusutan Irigasi	82.137.536,00	81.393.556,00	0,91

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.452.643,00	71.251.206,00	-72,70
Beban Penyusutan Jaringan	9.704.391,00	9.704.392,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	70.837,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.626.183.398,00	1.066.947.367,00	52,41
Jumlah	2.762.563.665,00	2.000.422.441,00	38,10

Berkurangnya nilai manfaat dari gedung bangunan serta peralatan dan mesin berupa mobil dan kendaraan bermotor karena usia barang semakin bertambah.

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-86.361.195,00	-158.080.000,00	-45,37
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-641.089.880,00	-267.339.254,00	139,80
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	41.024.780,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	88.412.600,00	378.770.625,00	-76,66
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2.125.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	21.616.999,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.500.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	59.740.000,00	0,00	0,00
Jumlah	-532.648.695,00	-25.031.630,00	2.027,90

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp153.931.312.830,00 dan Rp147.767.950.202,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-19.791.481.992,00 dan Rp-17.756.636.726,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.797.703.688,00 dan Rp196.463.433,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp242.741.000,00 dan Rp159.269.000,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

inciian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019.

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Persediaan Lainnya	242.741.000,00
Jumlah	242.741.000,00

E.3.2. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-16.086.118,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.892.661.000,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Tanah	2.530.928.000,00
Gedung dan Bangunan	4.282.711.000,00
Jalan dan Jembatan	66.727.000,00
Irigasi	12.295.000,00
Jumlah	6.892.661.000,00

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-321.612.194,00 dan Rp37.194.433,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-258.059.786,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-1.590.231,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-47.635.157,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-14.327.020,00
Gedung dan Bangunan	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00
Jumlah	-321.612.194,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.579.195.079,00 dan Rp23.723.535.921,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.528.644.392,00
Diterima dari Entitas Lain	-635.937.512,00
Transfer Keluar	-7.904.000,00
Transfer Masuk	410.511.357,00
Pengesahan Hibah Langsung	283.880.842,00
Jumlah	21.579.195.079,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-635.937.512,00 sedangkan DKEL sebesar Rp21.528.644.392,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp410.511.357,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018090200412013000KD	445.071.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018090200412013000KD	-34.559.643,00
Jumlah			410.511.357,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-7.904.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Persediaan Lainnya	018093000450840000KD	-7.904.000,00
Jumlah			-7.904.000,00

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp283.880.842,00 dan Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	ACIAR	Uang	283.880.842,00
Jumlah Nilai Hibah			283.880.842,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp162.516.729.605,00 dan Rp153.931.312.830,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- DIPA Loka Penelitian Sapi Potong Pada tahun Anggaran 2019 selain mengelola Dana APBN juga mengelola dana Hibah Luar Negeri (HLL) dari ACIAR (*Australian Centre for International Agricultural Research*) yang bernomor register 2L1HQBWA masa berlaku hibaha tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 jumlah total yang diterima tahun 2019 sebesar Rp283.880.842,00 atau \$30,398 dana yang masuk DIPA tahun 2019 sebesar Rp122.735.000, sedangkan yang sudah disahkan sebesar Rp122.734.352 terdiri dari belanja Barang sebesar Rp44.934.352, Belanja Modal sebesar Rp77.800.000 dan Sisanya Rp161.146.490 akan digunakan tahun berikutnya.
- Jurnal Umum Rp14.000.000 dilakukan karena ada pembangunan semi permanen, yaitu rumah potong kuku. Di SIMAK BMN masuk ekstrakomtabel, karena di bawah nilai kapitalisasi sehingga setelah ditransfer ke SAIBA menjadikan gedung dan bangunan menjadi belum diregister.
- Jurnal Penyesuaian Rp283.880.842 dilakukan karena di neraca bendahara pengeluaran muncul kas setara kas yang diakibatkan oleh transfer dana ACIAR ke rekening Bendahara Pengeluaran.